



Pelaporan *environmental, social, and governance* dan transparansi pajak

The convergence of environmental, social, and governance, and tax transparency

Arifatun Nasihah*, Muchamad Rizky Fauzi

Universitas Pamulang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini memetakan arah dan tren penelitian ESG serta transparansi pajak melalui analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Hasil visualisasi mengidentifikasi lima kluster utama dengan *corporate governance* sebagai simpul sentral: kluster merah (keberlanjutan dan stabilitas keuangan), biru (tax avoidance dan CSR), hijau (pengawasan internal dan nilai perusahaan), kuning (agresivitas pajak dan kinerja), serta ungu (struktur modal dan profitabilitas). Tren penelitian menunjukkan pergeseran temporal dari kajian etis tanggung jawab sosial menuju integrasi ESG dengan tata kelola pajak yang transparan dan kolaboratif. Isu-isu *emerging* seperti *digital tax governance*, *ESG disclosure*, dan *cooperative compliance* menjadi fokus riset terkini yang menekankan sinergi antara keberlanjutan, etika fiskal, dan kebijakan publik. Penelitian ini mengusulkan paradigma baru "*ESG Fiscal Transparency*" yang menempatkan pelaporan ESG dan praktik perpajakan sebagai pilar akuntabilitas dan keberlanjutan korporasi global.

Kata Kunci: *Environmental, Social, and Governance*, Transparansi Pajak, Manajemen Risiko

Abstract

This study maps the direction and trends of ESG and tax transparency research through bibliometric analysis using VOSviewer. Visualization results identify five main clusters with *corporate governance* as the central node: red cluster (*sustainability and financial stability*), blue cluster (*tax avoidance and CSR*), green cluster (*internal control and firm value*), yellow cluster (*tax aggressiveness and performance*), and purple cluster (*capital structure and profitability*). Research trends show a temporal shift from ethical studies of social responsibility toward integrating ESG with transparent and collaborative tax governance. Emerging issues such as *digital tax governance*, *ESG disclosure*, and *cooperative compliance* have become the latest research focus, emphasizing synergy between sustainability, fiscal ethics, and public policy. This study proposes a new paradigm, "*ESG Fiscal Transparency*," that positions ESG reporting and tax practices as pillars of accountability and sustainability for global corporations.

Keywords: *Environmental, Social, and Governance*, Tax Transparency, Risk Management.

Histori Artikel:

Diterima 6 November 2025, Direvisi 20 November 2025, Disetujui 26 November 2025, Dipublikasi 11 Desember 2025.

***Penulis Korespondensi:**

dosen03361@unpam.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.937>

PENDAHULUAN

Dalam lanskap bisnis global kontemporer, perusahaan multinasional menghadapi paradoks fundamental antara komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan praktik optimalisasi pajak yang agresif. Transformasi ESG dari sekadar instrumen etika bisnis menjadi indikator kinerja non-keuangan yang strategis telah menempatkan keberlanjutan korporat sebagai elemen sentral dalam legitimasi organisasional dan penciptaan nilai jangka panjang. Namun demikian, intensifikasi pelaporan ESG justru memunculkan kontradiksi epistemologis terkait perilaku fiskal perusahaan, khususnya dalam konteks praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun pajak memiliki peran instrumental dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi (Hidayat & Zuhroh, 2023; Mukhtaruddin et al., 2025; Sunandes et al., 2025), realitas empiris menunjukkan bahwa korporasi cenderung mempersepsikan kewajiban pajak sebagai beban yang menggerus profitabilitas, sehingga memicu insentif untuk mengimplementasikan strategi efisiensi pajak melalui skema legal maupun eksploitasi ambiguitas regulasi. Ketegangan inheren antara imperatif untuk memproyeksikan identitas sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan tekanan struktural untuk memaksimalkan *shareholder value* menciptakan dilema strategis yang memerlukan investigasi mendalam. Dalam konteks ini, pertanyaan krusial yang menjadi fokus literatur kontemporer adalah apakah perusahaan dengan skor ESG tinggi menunjukkan kepatuhan fiskal yang superior, ataukah justru memanfaatkan *disclosure* ESG sebagai mekanisme legitimasi simbolik untuk mengaburkan praktik penghindaran pajak yang agresif (Elamer et al., 2024; Mio et al., 2025).

Pajak secara fundamental merupakan kontribusi obligatoris masyarakat kepada negara untuk membiayai kesejahteraan publik, sehingga pembayaran pajak yang proporsional dapat dipandang sebagai manifestasi esensial tanggung jawab sosial korporat (Fauzi, 2023; Hidayat & Zuhroh, 2023). Namun, dikotomi persepsi muncul karena entitas bisnis cenderung memandang pajak sebagai beban yang mengikis profitabilitas dan menghambat ekspansi operasional, yang mendorong praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui eksploitasi ambiguitas regulasi perpajakan (Hidayat & Zuhroh, 2023). Meskipun legal dan berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik ini tetap mengakibatkan erosi basis pajak dan kerugian fiskal negara yang signifikan (Hidayat & Zuhroh, 2023; Mukhtaruddin et al., 2025). Secara paralel, paradigma ESG telah bertransformasi dari praktik sukarela menjadi kerangka komprehensif dan kewajiban regulatoris untuk mengevaluasi komitmen korporat terhadap praktik berkelanjutan dan etis (Arieftiara et al., 2025; Ekawati, 2025; Rizkita et al., 2025).

Interseksi antara ESG dan perilaku pajak memunculkan paradoks fundamental yang dapat dielaborasi melalui tiga perspektif teoritis. Teori Pemangku Kepentingan mengargumentasikan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban intrinsik dalam menyeimbangkan kepentingan seluruh stakeholder (Mio et al., 2025; Mukhtaruddin et al., 2025; Velte, 2023). Sebaliknya, Teori Legitimasi mengindikasikan bahwa aktivitas ESG dapat berfungsi sebagai taktik simbolik untuk mengaburkan praktik penghindaran pajak (Ekawati, 2025; Mukhtaruddin et al., 2025), sementara Teori Agensi menyoroti konflik kepentingan yang mendorong minimalisasi beban pajak sambil memanfaatkan ESG untuk membangun reputasi manajerial (Ekawati, 2025; Mukhtaruddin et al., 2025; Velte, 2023). Ketegangan ini mencerminkan evolusi paradigmatik dari pandangan konvensional maksimalisasi profit Friedman menuju pendekatan *triple bottom line* yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ekawati, 2025), di mana penghindaran pajak kini direframing dari manajemen finansial prudent menjadi isu governance dan keberlanjutan, dengan investor institusional semakin mengakui inkohistensi klaim tanggung jawab sosial perusahaan yang menggerus sumber daya publik melalui strategi pajak agresif (Mio et al., 2025).

Fenomena penghindaran pajak korporasi multinasional telah mengemuka dalam kasus global seperti Google, Starbucks, dan Volkswagen yang menggunakan strategi profit shifting ke yurisdiksi tarif rendah, mengakibatkan erosi basis pajak dan mencederai keadilan fiskal internasional (Mukhtaruddin et al., 2025). Praktik serupa teridentifikasi di kawasan ASEAN, termasuk kasus PT Adaro Energy Indonesia yang diduga menggunakan skema transfer pricing untuk mereduksi kewajiban pajak domestik hingga USD 125 juta. Dalam konteks negara berkembang, kondisi ini menciptakan dilema kebijakan: pemerintah mengampanyekan adopsi ESG namun keterbatasan kapasitas governance dan pengawasan fiskal membuka ruang bagi praktik greenwashing, yakni instrumentalisasi narasi keberlanjutan untuk mengkamufase perilaku fiskal oportunistik. Kompleksitas teramplifikasi di Asia Tenggara karena heterogenitas regulasi pelaporan keberlanjutan yang masih berkembang, di mana Indonesia baru mengimplementasikan kewajiban laporan keberlanjutan pada 2019 melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 sementara Malaysia telah menerapkan pedoman ESG sejak 2016 (Arieftiara et al., 2025). Disparitas regulatoris ini menghasilkan variasi substantif dalam kualitas disclosure ESG, memungkinkan korporasi menggunakan pelaporan ESG sebagai mekanisme legitimasi superfisial tanpa komitmen autentik terhadap perilaku etis termasuk kepatuhan perpajakan, yang mengindikasikan urgensi untuk mengkaji secara empiris relasi antara kinerja ESG dan perilaku pajak korporat dalam konteks ekonomi berkembang di mana infrastruktur institusional dan enforcement regulasi masih mengalami proses konsolidasi.

Literatur empiris mengenai relasi antara kinerja ESG dan penghindaran pajak korporat menunjukkan heterogenitas temuan yang substansial, yang dapat dikategorisasi ke dalam tiga argumen teoretis. Argumen pertama mengidentifikasi hubungan negatif, di mana kinerja ESG superior berfungsi sebagai inhibitor praktik penghindaran pajak, berlandaskan premis bahwa perusahaan dengan komitmen autentik terhadap pemangku kepentingan menunjukkan konsistensi perilaku etis termasuk kepatuhan fiskal proporsional (Hidayat & Zuhroh, 2023; Velte, 2023; Yoon & Lee, 2021). Argumen kedua mengajukan proposisi kontradiktif bahwa ESG dapat diinstrumentalisasi sebagai strategi legitimasi simbolik untuk mengaburkan praktik penghindaran pajak agresif melalui mekanisme halo effect (Ekawati, 2025; Mukhtaruddin et al., 2025; Nasih et al., 2024).

Argumen ketiga menunjukkan kompleksitas relasional yang kontekstual, di mana beberapa studi tidak menemukan korelasi signifikan (Damayanty & Putri, 2021; Montenegro, 2021), mengindikasikan bahwa perusahaan memperlakukan ESG dan strategi pajak sebagai domain independen yang dimoderasi oleh variabel struktural seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan, dan kompensasi eksekutif. Dalam konteks internasional, Elamer et al. (2024) menunjukkan bahwa pasar modal Prancis memberikan valuasi premium terhadap kinerja ESG autentik namun mendiskon perusahaan yang menggunakan keberlanjutan sebagai kamufase praktik fiskal agresif, sementara di kawasan ASEAN, Arieftiara et al. (2025) mengungkapkan bahwa kepemilikan mayoritas di Indonesia berkorelasi negatif dengan pelaporan ESG namun positif terhadap penghindaran pajak, menyoroti disparitas institusional dalam struktur corporate governance regional.

Fragmentasi literatur yang ditandai oleh ambiguitas, bukti inkonklusif, dan temuan kontradiktif menciptakan kebutuhan mendesak untuk melakukan sintesis sistematis sebelum mengakumulasi studi empiris tambahan yang berpotensi mengamplifikasi inkonsistensi eksisting. Meskipun literatur telah memberikan kontribusi signifikan, beberapa lacuna riset tetap teridentifikasi: mayoritas studi mengadopsi pendekatan empiris kuantitatif yang berfokus pada kausalitas langsung tanpa pemetaan sistematis terhadap evolusi diskursus akademis yang mengintegrasikan perspektif teoretis beragam; studi di kawasan ASEAN masih terfragmentasi dengan fokus dominan pada relasi ESG terhadap kinerja finansial bukan dimensi transparansi fiskal; dan terdapat gap metodologis berupa minimnya kajian bibliometrik yang menganalisis

jaringan ko-sitasi, evolusi tema penelitian, dan kolaborasi ilmiah lintas negara. Analisis bibliometrik menawarkan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi volume data ilmiah guna mengurai evolusi bidang penelitian spesifik (Donthu et al., 2021).

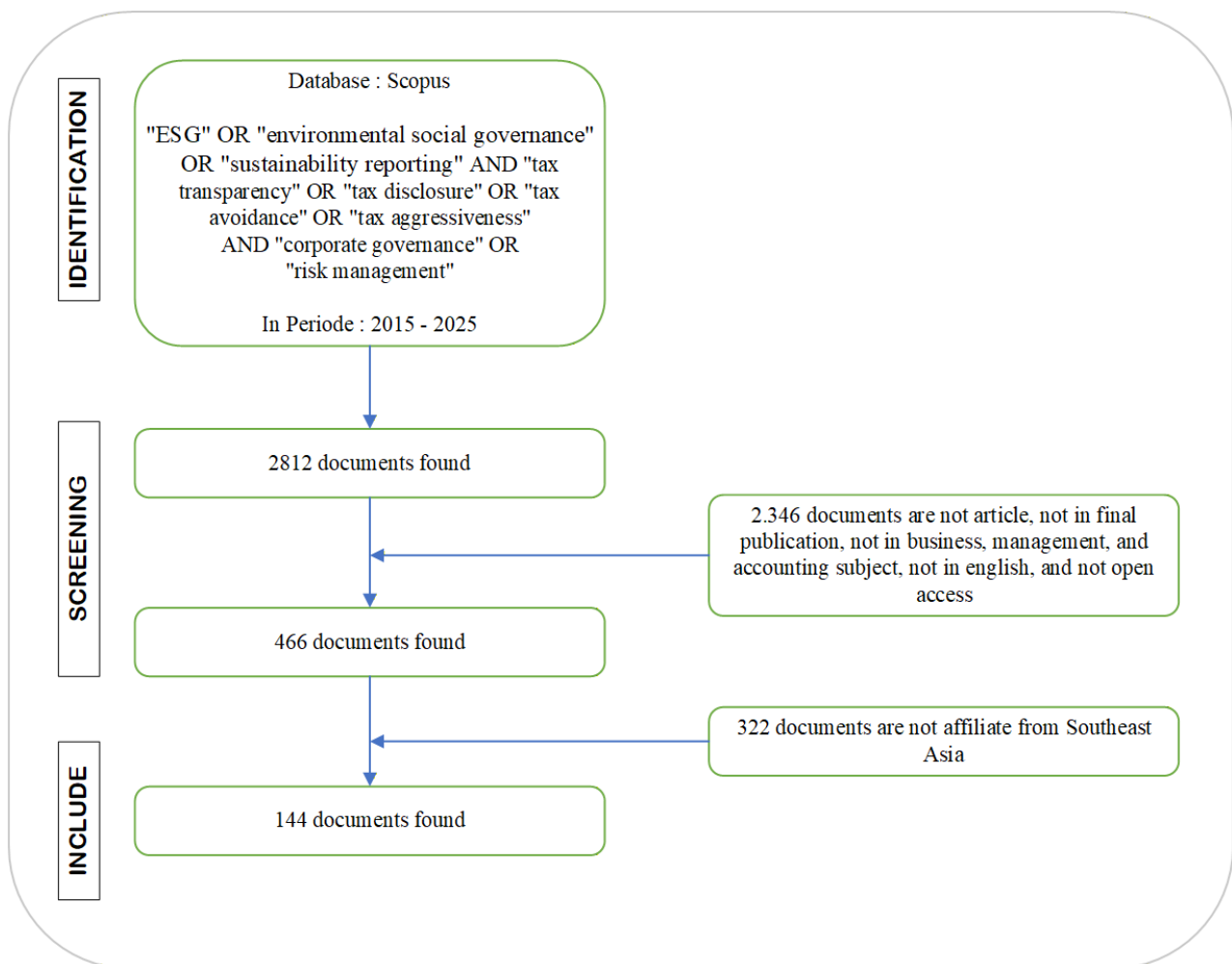
Penelitian ini bertujuan menganalisis tren publikasi melalui identifikasi pertumbuhan temporal, jurnal inti, penulis berpengaruh, serta distribusi geografis dan institusional kontribusi ilmiah, sekaligus mengklasifikasikan topik penelitian melalui teknik science mapping seperti co-citation analysis, bibliographic coupling, dan co-word analysis untuk memetakan struktur konseptual dan intelektual literatur eksisting. Dengan demikian, penelitian ini diposisikan sebagai kontribusi fundamental yang menyediakan science map komprehensif dari literatur ESG dan transparansi pajak, mensintesis pengetahuan eksisting, menstrukturkan discourse akademis, mengidentifikasi sumber kontradiksi berdasarkan aliran penelitian berbeda, dan menerangi trajektori riset masa depan yang paling prospektif dalam menavigasi kompleksitas interseksi antara keberlanjutan korporat dan tanggung jawab perpajakan.

METODE

Studi ini menerapkan metode bibliometrik melalui analisis metadata dari artikel-artikel yang diperoleh melalui platform Scopus. Riset ini dikategorikan sebagai kajian tinjauan pustaka, yang berdasarkan Snyder (2019) dan Xiao & Watson (2019) didefinisikan sebagai teknik untuk mengenali dan menelaah berbagai informasi dalam literatur ilmiah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan riset secara mendalam. Sementara itu, Kurniati et al. (2022) menyatakan bahwa pendekatan SLR menawarkan manfaat dalam merangkum pemikiran mutakhir terkait suatu tema melalui metodologi yang transparan dan sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian.

Ekstraksi data dilaksanakan melalui platform Scopus dengan menerapkan menggunakan kata kunci ESG, sustainability reporting, tax transparency, tax avoidance, risk management. Pemilihan dokumen dari scopus mengikuti kaidah PRISMA seperti pada gambar 1 yang merujuk pada Gallagher et al. (2016) dalam menjalankan tahapan inklusi dan eksklusi. Pencarian awal menghasilkan 2.831 dokumen yang selanjutnya mengalami proses penyaringan dengan beberapa parameter.

Periode publikasi dibatasi dari tahun 2015 sampai 2025 dengan pertimbangan untuk menangkap perkembangan literatur dalam satu dekade terakhir yang mencerminkan tren dan dinamika kontemporer dalam bidang kajian ini. Pemilihan tahun 2015 sebagai titik awal juga mempertimbangkan bahwa periode sepuluh tahun dianggap cukup representatif untuk mengidentifikasi pola perkembangan penelitian sekaligus menjaga relevansi temuan dengan kondisi terkini. Selain itu, bidang kajian dibatasi pada Business, Management and Accounting, tipe publikasi berupa artikel yang telah terbit, dan afiliasi kelembagaan pengarang berada di region Asia Tenggara. Implementasi parameter seleksi tersebut memperoleh 144 dokumen yang kemudian diolah menggunakan aplikasi VOSviewer untuk melakukan analisis dan visualisasi bibliometrik.



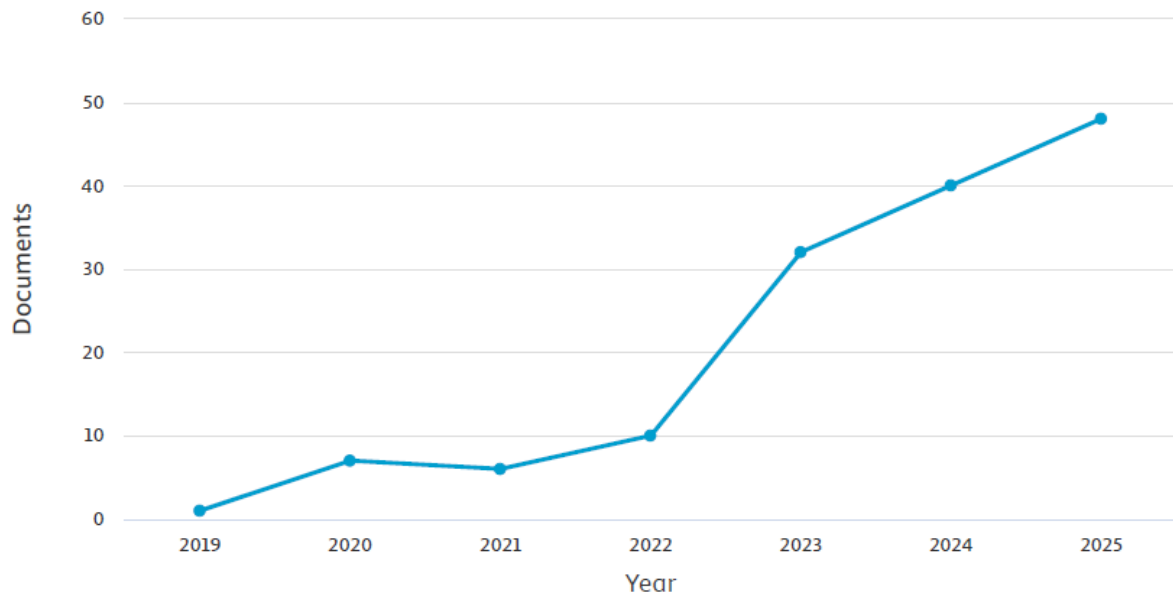
Gambar 1. Diagram PRISMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tren publikasi mengenai topik ini seperti pada gambar 2, menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat dinamis selama periode 2019-2025. Pada fase awal (2019-2021), jumlah dokumen masih relatif rendah dan stabil dengan kisaran 1-7 publikasi per tahun, mengindikasikan bahwa topik penelitian masih berada dalam tahap eksplorasi awal. Namun, terjadi perubahan signifikan mulai tahun 2022 dengan lonjakan publikasi menjadi sekitar 11 dokumen. Tren akselerasi ini terus berlanjut secara eksponensial, di mana jumlah publikasi meningkat menjadi 32 dokumen di tahun 2023, 41 dokumen di tahun 2024, dan mencapai 49 dokumen di tahun 2025. Peningkatan hampir 50 kali lipat dari tahun 2019 ke 2025 menunjukkan bahwa bidang penelitian ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi fokus perhatian yang semakin besar dalam komunitas ilmiah.

Documents by year

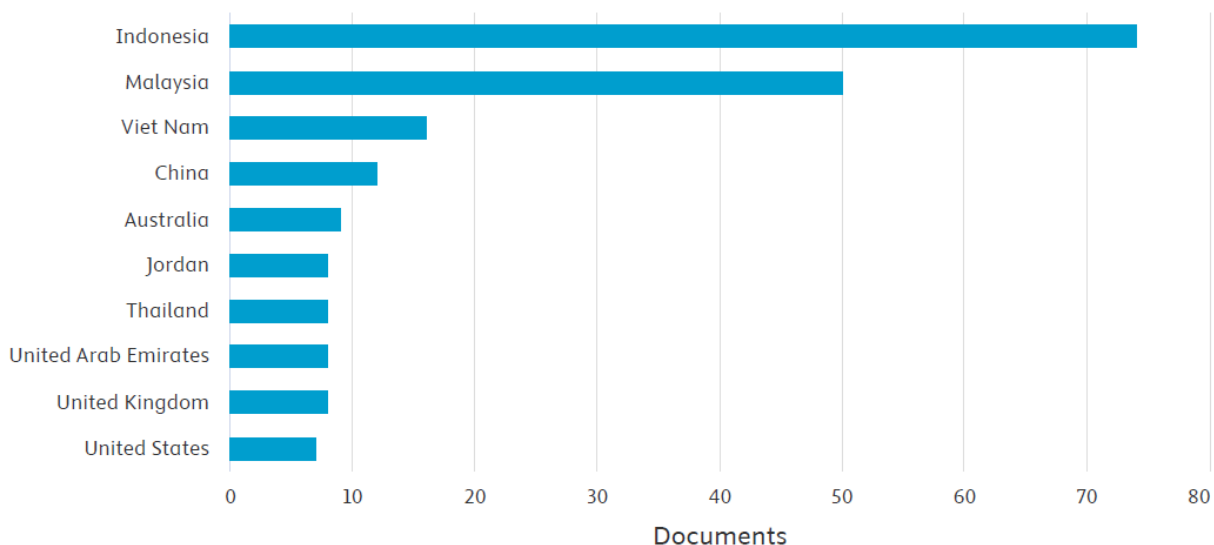


Gambar 2. Tren Publikasi

Lonjakan publikasi pasca-2021 dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya relevansi topik dengan kebutuhan praktis atau kebijakan kontemporer, kemajuan dalam metodologi penelitian yang memungkinkan kajian lebih mendalam, serta kemungkinan efek domino di mana publikasi awal memicu minat peneliti lain untuk mengeksplorasi area yang sama. Pola pertumbuhan seperti ini umumnya mengikuti kurva S, di mana setelah fase pertumbuhan cepat akan diikuti oleh fase stabilisasi seiring dengan semakin matangnya bidang penelitian. Meskipun proyeksi menunjukkan tren pertumbuhan akan terus berlanjut dalam jangka pendek, laju peningkatan diperkirakan akan mulai melambat ketika bidang penelitian mencapai saturasi pada aspek-aspek fundamental dan fokus bergeser ke arah pendalaman atau aplikasi temuan yang sudah ada.

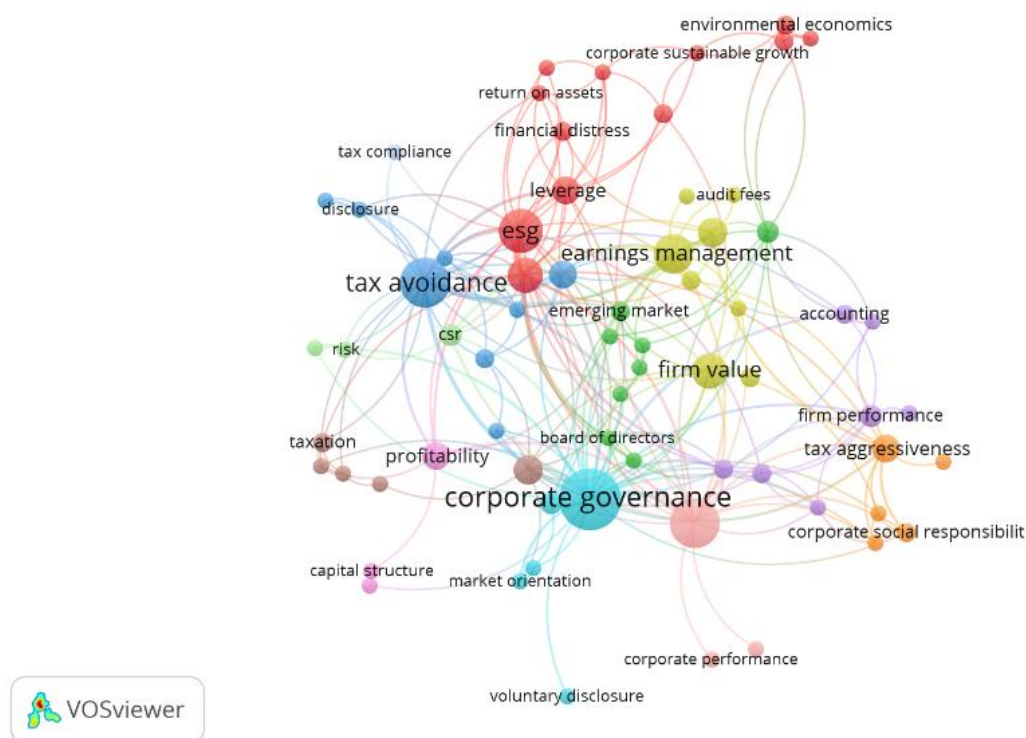
Documents by country or territory

Compare the document counts for up to 15 countries/territories.



Gambar 3. Sebaran Negara

Analisis distribusi publikasi berdasarkan negara mengungkapkan konsentrasi geografis yang menarik, di mana kawasan Asia Tenggara mendominasi kontribusi riset global dalam topik ini. Indonesia memimpin dengan margin yang signifikan, menghasilkan sekitar 75 dokumen atau hampir setengah dari total publikasi yang teridentifikasi, diikuti oleh Malaysia dengan 50 dokumen. Dominasi kedua negara ini sejalan dengan tren pertumbuhan eksponensial yang diamati sebelumnya, mengindikasikan bahwa lonjakan publikasi pasca-2021 sebagian besar didorong oleh intensifikasi riset di kawasan Asia Tenggara. Vietnam menempati posisi ketiga dengan sekitar 17 dokumen, sementara negara-negara lain seperti China, Australia, Jordan, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, dan United States masing-masing berkontribusi dalam kisaran 7-12 dokumen dengan distribusi yang relatif merata. Kontribusi yang jauh lebih rendah dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa topik penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara, kemungkinan berkaitan dengan karakteristik geografis, kondisi sosial-ekonomi, tantangan lingkungan spesifik, atau prioritas kebijakan regional yang menjadikan isu ini lebih mendesak untuk dikaji secara mendalam di wilayah tersebut.

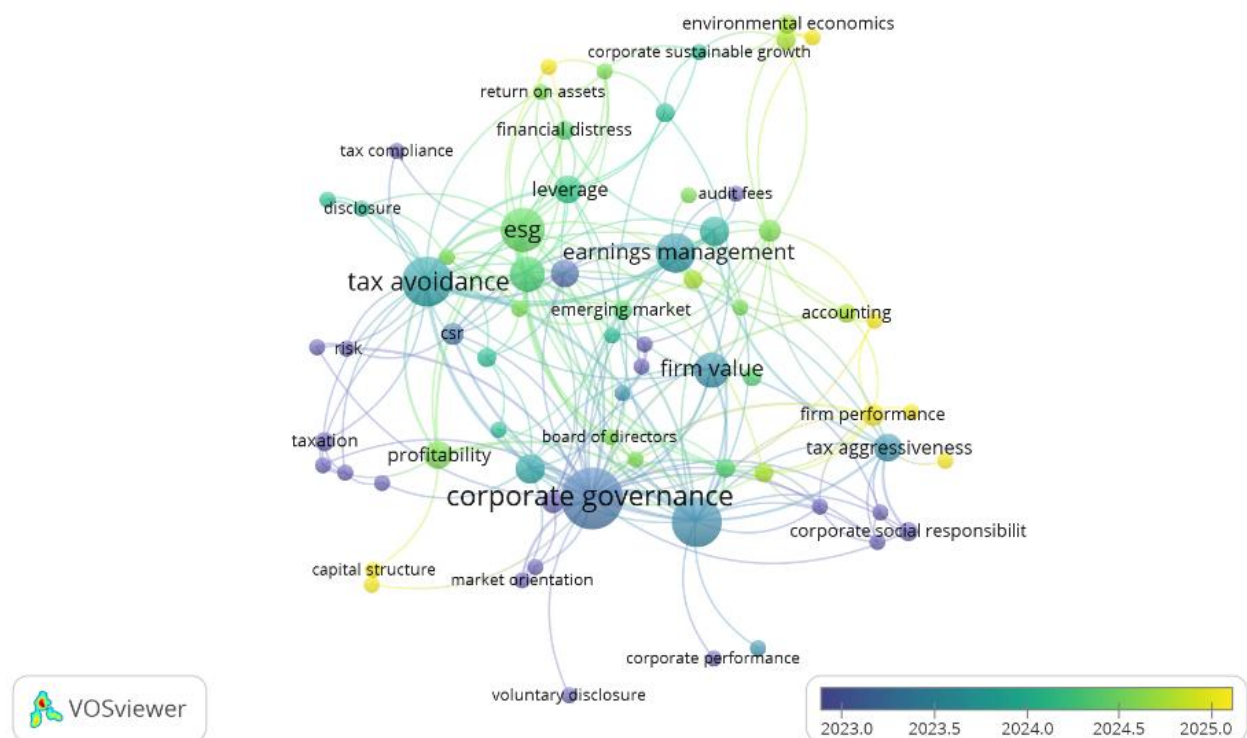


Gambar 4. Visualisasi Peta Jaringan

Peta jaringan pada Gambar 4 memperlihatkan bahwa struktur tematik penelitian terbagi menjadi lima kluster utama dengan “corporate governance” sebagai simpul sentral yang menghubungkan seluruh dimensi kajian. Kluster merah, yang mendominasi bagian atas visualisasi, berfokus pada tema lingkungan dan keberlanjutan dengan kata kunci seperti *environmental economics*, *corporate sustainable growth*, *ESG*, *leverage*, *financial distress*, dan *return on assets*. Keterhubungan antara *ESG*, *financial distress*, dan *leverage* menunjukkan bahwa penelitian banyak menelaah dampak praktik keberlanjutan terhadap stabilitas dan kinerja keuangan perusahaan. Beberapa kluster yang teridentifikasi adalah:

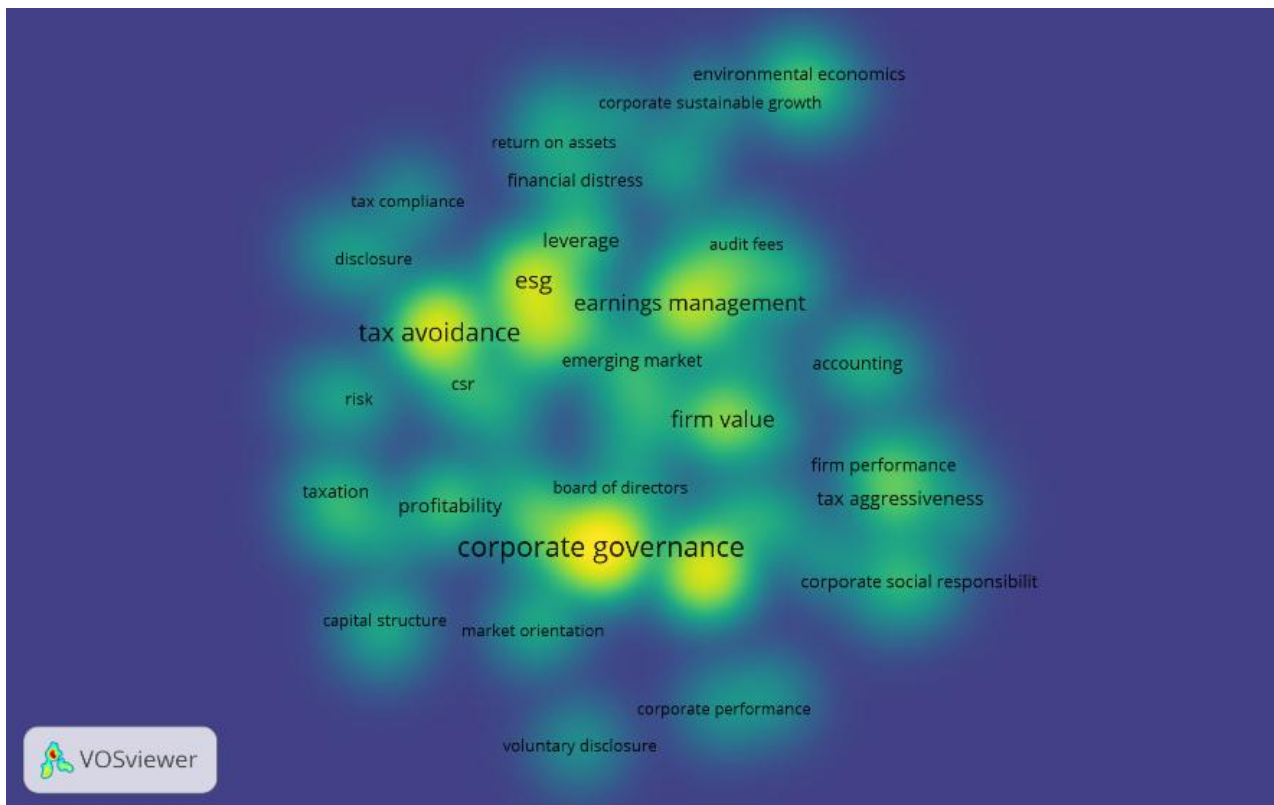
Tabel 1. Klasterisasi Penelitian

Klaster	Warna Dominan	Fokus Topik	Kata Kunci Inti
1	Biru	Tax governance & compliance	tax avoidance, disclosure, tax compliance, CSR, risk
2	Merah	ESG dan kinerja keberlanjutan	ESG, environmental economics, leverage, financial distress
3	Hijau	Earnings management dan tata kelola	earnings management, audit fees, accounting, firm value
4	Cokelat-ungu	Corporate governance dan firm performance	corporate governance, profitability, capital structure, corporate performance
5	Kuning-oranye	Corporate social responsibility dan tax aggressiveness	tax aggressiveness, CSR, firm performance



Gambar 6. Evolusi Temporal

Gambar 6 dan Gambar 7 secara bersamaan mengungkapkan evolusi temporal dan konsentrasi tematik penelitian yang saling melengkapi. Analisis temporal menunjukkan bahwa topik-topik fundamental seperti "taxation", "risk", "profitability", "capital structure", dan "market orientation" yang ditandai dengan warna ungu-biru merupakan tema awal (2023-awal 2024), sementara pergeseran fokus terjadi pada pertengahan 2024 dengan munculnya topik "tax avoidance", "disclosure", "csr", "earnings management", dan "corporate governance" dalam warna hijau-cyan. Periode terkini (2024-2025) didominasi oleh tema-tema baru berwarna kuning-hijau terang seperti "environmental economics", "corporate sustainable growth", "esg", "tax aggressiveness", dan "corporate social responsibility", mengkonfirmasi bahwa isu keberlanjutan dan praktik perpajakan agresif menjadi frontier penelitian terkini.



Gambar 7. Pola Kepadatan Penelitian

Pola densitas memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat hotspot utama penelitian. Area dengan intensitas tertinggi berpusat pada "tax avoidance" beserta topik-topik satelitnya (disclosure, tax compliance, CSR), mengindikasikan bahwa praktik perpajakan korporat merupakan concern paling dominan dalam literatur. Area densitas tinggi lainnya meliputi kluster "esg" dan "earnings management" yang berdekatan, menunjukkan body of research substansial mengenai interaksi antara praktik keberlanjutan dengan kualitas pelaporan keuangan, serta area "corporate governance" dan "firm value" yang mengkonfirmasi fokus pada mekanisme tata kelola dan dampaknya terhadap valuasi perusahaan. Sebaliknya, topik-topik di pinggiran seperti "voluntary disclosure", "corporate performance", "capital structure", dan "market orientation" memiliki densitas rendah meskipun relevan, mengindikasikan area penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Kombinasi kedua visualisasi ini mengungkapkan bahwa penelitian tidak hanya berkembang pesat secara kuantitas, tetapi juga mengalami transformasi paradigmatis dari fokus tradisional pada metrik keuangan menuju pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi lingkungan, sosial, tata kelola, dan implikasi perpajakannya, dengan konsentrasi tertinggi pada tiga isu utama yaitu praktik perpajakan korporat, implementasi ESG dan manajemen laba, serta mekanisme corporate governance.

Arah Tren Penelitian ESG dan Transparansi Pajak

Arah tren penelitian mengenai pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) dan transparansi pajak menunjukkan pergeseran dari isu moralitas korporasi menuju tata kelola fiskal yang berbasis keberlanjutan dan data. Berdasarkan hasil pengujian dan telaah literatur terkini, riset pada 2019–2022 masih menempatkan pajak dalam kerangka corporate social responsibility (CSR), di mana kepatuhan pajak dianggap sebagai refleksi etika sosial perusahaan. Namun, sejak 2023–2025 fokus penelitian bergeser ke integrasi ESG dan tata kelola pajak digital. Lee (2024) menegaskan bahwa pajak kini menjadi dimensi strategis dalam kerangka ESG karena menggambarkan akuntabilitas sosial dan legitimasi fiskal perusahaan. Penelitian Luo & Xu (2024) memperkuat arah ini dengan menunjukkan bahwa reformasi administrasi pajak berbasis big data

di Tiongkok melalui Golden Tax Project III tidak hanya meningkatkan transparansi fiskal, tetapi juga menekan praktik greenwashing dan manipulasi ESG. Dengan demikian, penelitian global bergerak ke arah pemahaman yang lebih sistemik dengan menyatukan aspek etika, efisiensi fiskal, dan teknologi dalam mengukur keberlanjutan korporasi.

Sementara itu, tren di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia menampilkan dinamika yang lebih kompleks. Yanto et al. (2025) menemukan adanya hubungan timbal balik antara kinerja ESG dan agresivitas pajak, di mana perusahaan berupaya menyeimbangkan reputasi keberlanjutan dengan efisiensi fiskal. Dalam konteks ini, pajak tidak lagi sekadar kewajiban legal, tetapi menjadi alat legitimasi strategis yang terkait erat dengan nilai perusahaan. Penelitian Chandrasena et al. (2025) di Amerika Utara juga menyoroti pentingnya mekanisme internal seperti sustainability committee dalam mengarahkan hubungan tersebut, perusahaan dengan tata kelola berkelanjutan cenderung menunjukkan transparansi pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, arah penelitian terkini menunjukkan sintesis baru yakni ESG dan pajak dipandang sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membentuk fiscal sustainability governance. Ke depan, riset di bidang ini cenderung menekankan keterkaitan antara pelaporan ESG, teknologi fiskal, dan struktur tata kelola sebagai dasar pembentukan paradigma “ESG Fiscal Transparency.”

Tema Riset Lanjutan

Hasil analisis bibliometrik mengindikasikan bahwa trajektori penelitian di masa depan akan bergerak ke arah integrasi yang lebih komprehensif antara praktik pelaporan ESG, transparansi perpajakan korporat, dan mekanisme tata kelola yang lebih holistik. Seiring meningkatnya perhatian terhadap transparansi korporasi dan tanggung jawab sosial, penelitian ke depan diproyeksikan akan menyoroti hubungan dinamis antara pelaporan ESG, penghindaran pajak, serta mekanisme kelembagaan dan regulasi lintas negara. Okuyama et al. (2025) menegaskan bahwa perusahaan menyesuaikan perilaku pembayaran pajak berdasarkan risiko reputasi ESG; perusahaan dengan risiko tinggi cenderung membayar pajak lebih besar untuk memperbaiki citra publik. Temuan ini menandai munculnya perspektif baru yang memandang keputusan fiskal sebagai strategi manajemen reputasi. Dengan demikian, arah riset global di masa depan kemungkinan akan berfokus pada ESG reputation risk management dan mekanisme transparansi berbasis reputasi yang memediasi hubungan antara kepatuhan pajak dan persepsi publik.

Di sisi lain, penelitian akan semakin menekankan pendekatan institutional governance dan kolaborasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Alexander & Menicacci (2025) menemukan bahwa program Cooperative Compliance (CC) di Italia berhasil menurunkan agresivitas pajak dan meningkatkan transparansi fiskal, namun juga menimbulkan efek substitusi terhadap kinerja ESG yakni perusahaan lebih patuh pajak tetapi menurunkan aktivitas sosial atau lingkungan. Hal ini membuka ruang riset baru mengenai keseimbangan antara kepatuhan pajak dan performa ESG dalam kerangka kebijakan kolaboratif. Penelitian Amarna et al. (2025) turut memperkuat arah ini dengan menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dapat memiliki dua sisi: stakeholder-friendly atau legitimacy-seeking, tergantung konteks keuangan dan tata kelola perusahaan. Penelitian mendatang diproyeksikan akan mengadopsi pendekatan analisis multitingkat yang mengintegrasikan data pada level korporat, sektoral, dan nasional guna mengeksplorasi dinamika kompleks antara regulasi perpajakan, kinerja keberlanjutan perusahaan, dan kualitas sistem tata kelola di tingkat negara Montenegro (2021). Dengan demikian, future direction riset ESG dan transparansi pajak akan berfokus pada pembentukan paradigma baru: “Collaborative Fiscal Sustainability Governance”, yaitu tata kelola keberlanjutan yang mengintegrasikan kebijakan pajak etis, inovasi pelaporan ESG, dan mekanisme kolaborasi publik-swasta untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi global.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil analisis bibliometrik dan sintesis literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai pelaporan ESG dan transparansi pajak telah berevolusi dari isu moral dan legitimasi sosial menuju paradigma baru berbasis tata kelola fiskal berkelanjutan (fiscal sustainability governance). Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama: pertama, memetakan evolusi konseptual dari pendekatan normatif-etis menuju kerangka strategis-institusional; kedua, mengidentifikasi struktur intelektual dan jejaring kolaborasi penelitian di kawasan Asia Tenggara; ketiga, mengusulkan kerangka paradigma "ESG Fiscal Transparency" sebagai integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan akuntabilitas fiskal. Temuan ini memiliki implikasi praktis penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Regulator perlu mengintegrasikan transparansi pajak sebagai komponen wajib dalam kerangka pelaporan ESG dan mengembangkan mekanisme insentif fiskal. Perusahaan dapat memanfaatkan transparansi pajak sebagai strategi pengelolaan reputasi dan nilai jangka panjang. Investor dapat menggunakan kerangka ini sebagai alat evaluasi risiko ESG, sementara akademisi mendapatkan peta penelitian komprehensif untuk eksplorasi lebih lanjut.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penggunaan satu database (Scopus) dan pembatasan periode 2015-2025 serta region Asia Tenggara membuat cakupan analisis terbatas dan temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi. Analisis VOSviewer yang bersifat deskriptif-eksploratif tidak menjelaskan hubungan kausal, dan penelitian ini juga tidak melakukan analisis konten mendalam terhadap seluruh artikel terpilih. Arah penelitian mendatang perlu mengembangkan model analitik yang mampu mengukur hubungan dinamis antara ESG performance, tax transparency, dan institutional governance pada berbagai konteks negara dan industri. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menilai kepatuhan pajak sebagai dimensi etis, tetapi juga sebagai indikator efektivitas sistem keberlanjutan fiskal dan sosial, sehingga memperkuat paradigma "ESG Fiscal Transparency" sebagai kerangka integratif yang menghubungkan keberlanjutan korporat dengan akuntabilitas fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A., & Menicacci, L. (2025). Tax governance as a social responsibility of the firm : evidence from the Italian cooperative compliance program. *SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL*, 21(8), 1549–1565. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2025-0094>
- Amarna, K., Pérez, M. V. L., Sánchez, R. G., & Ariza, L. R. (2025). ESG Information Disclosure and Its Relationship to Tax Practices : Stakeholder- - Friendly or Legitimacy- - Seeking? *Sustainable Development RESEARCH*, 33, 3906–3917. <https://doi.org/10.1002/sd.3333>
- Ariefiara, D., Widyastuti, S., Miftah, M., & Wijaya, S. (2025). *The Role of Largest Ownership Structure in ESG Reporting , Tax Avoidance , and Firm Value : Evidence from Emerging Markets*. 5(2), 293–321.
- Chandrasena, S., Matthews, L., & Gerged, A. M. (2025). Does the presence of a sustainability committee strengthen the impact of ESG disclosure on tax aggressiveness ? Insights from North America. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 65, 1039–1065.
- Damayanty, P., & Putri, T. R. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as the Moderating Variable. *Conference: 1st International Conference on Sustainable Management and Innovation*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Marc, W. (2021). How to conduct a bibliometric analysis : An overview and guidelines. *Journal of Business Research Journal*, 133, 285–296.
- Ekawati, E. (2025). *THE RELATIONSHIPS BETWEEN ESG RESPONSIBILITY , EARNINGS MANAGEMENT , AND TAX AGGRESSIVENESS : 40(1)*, 75–107.
- Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). *Corporate tax avoidance and firm value : The moderating role of environmental , social , and governance (ESG) ratings*. June, 7446–7461. <https://doi.org/10.1002/bse.3881>
- Fauzi, M. R. (2023). Analisis Dampak Zakat Sebagai Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia : Mini Riset Literatur. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 3(4), 331–335.

<https://doi.org/https://doi.org/10.60036/jbm.v3i4.art3>

- Gallagher, K. E., Kadokura, E., Eckert, L. O., Miyake, S., Mounier-Jack, S., Aldea, M., Ross, D. A., & Watson-Jones, D. (2016). Factors influencing completion of multi-dose vaccine schedules in adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, 16(1), 172. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2845-z>
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). *The Impact of Environmental , Social and Governance , Sustainable Financial Performance , Ownership Structure , and Composition of Company Directors on Tax Avoidance : Evidence from Indonesia*. 13(6), 311–320.
- Kurniati, E., Ibrohim, I., Suryadi, A., & Saefi, M. (2022). International scientific collaboration and research Topics on STEM education: A systematic review. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 18(4), em2095. <https://doi.org/10.29333/ejmste/11903>
- Lee, H. (2024). *Exploring the Relationship Between Environmental , Social , and Governance and Tax Avoidance Strategies*. December, 1–17. <https://doi.org/10.1177/21582440241298089>
- Luo, J., & Xu, J. (2024). *The impact of big data tax administration on corporate ESG — A quasi-natural experiment based on Golden Tax Project III*. 17.
- Mio, C., Panfilo, S., & Scarpa, F. (2025). *Virtue Ethics , Corporate Sustainability , and Tax Disclosure : Evidence From Global Fortune 500*. 7033–7051. <https://doi.org/10.1002/bse.4327>
- Montenegro, T. M. (2021). Tax Evasion , Corporate Social Responsibility and National Governance : A Country-Level Study. *Sustainability*, 13(1166), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13201166>
- Mukhtaruddin, Novriansa, A., & Siahaan, H. M. A. (2025). *Asian Economic and Financial Review Environmental , social and governance , and tax avoidance : Study in ASEAN countries*. 15(6), 996–1010. <https://doi.org/10.55493/5002.v15i6.5458>
- Nasih, M., Harymawan, I., Rasid, S. Z. A., & Putra, F. K. G. (2024). Tax avoidance and sustainability reporting: Alignment or greenwashing strategy? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(6), 6335–6351. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/csr.2927>
- Okuyama, A., Tsugawa, S., Matsunaga, C., & Managi, S. (2025). Companies adjust tax payments to offset changes in publicly perceived impact on environment, social, and governance factors. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(115), 1–16. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04199-4>
- Rizkita, M. A., Fauzi, M. R., Nurrahma, A. A., & Hermawan, A. (2025). Mapping the Research Landscape of SME Digitalization : A Bibliometric Analysis. *RISK : Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 06(01), 1–12.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sunandes, A., Fauzi, M. R., & Makaryanawati, M. (2025). Trends and Transformations in Financial Behavior of SMEs in Southeast Asia: A Bibliometric Review. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 4(2), 495–508. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v4i2.206>
- Velte, P. (2023). *Sustainable institutional investors , corporate sustainability performance , and corporate tax avoidance : Empirical evidence for the European capital market*. March, 2406–2418. <https://doi.org/10.1002/csr.2492>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yanto, H., Hajawiyah, A., & Baroroh, N. (2025). The reciprocal effect of environmental , social , and governance (ESG) practices and tax aggressiveness in Indonesian and Malaysian companies. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1), 339–351. [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.25](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.25)
- Yoon, B., & Lee, J. (2021). *The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance — Evidence from Korea*. 1–16.